



# Analisis Ketergantungan dalam Hubungan Tiongkok dengan Hong Kong, Taiwan dan Makau dalam Era Globalisasi

Yuniar Zahra Alfriani\*, Yulita Nilam Fridiyanti

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

**Abstrak:** Hubungan antara Tiongkok, Taiwan, Makau, dan Hong Kong menjadi fokus internasional karena mencerminkan berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks dalam isu internasional. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan secara resmi Makau serta Hong Kong kembali ke kedaulatan Tiongkok di bawah otonomi khusus yaitu kebijakan *“one country, two systems”*. Dalam Politik Internasional ini sangat penting karena melibatkan batas kedaulatan negara dan identitas nasional, ini berdampak langsung pada stabilitas wilayah Asia Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan analisis terhadap sejarah, konteks sosial-politik, ekonomi, dan karakteristik unik dari setiap wilayah. Menggunakan sumber yang diperoleh dari jurnal, buku, dan *website*, penelitian ini menemukan secara ekonomi Hong Kong, Taiwan, dan makau sangat bergantung pada Tiongkok. Namun secara Sosial menjadi tantangan besar bagi Tiongkok dalam menghadapi aspirasi identitas lokal dan krisis kepercayaan Hong Kong dan Taiwan terhadap pemerintah Tiongkok.

**Kata kunci:** Stabilitas, Kedaulatan Negara, Satu Negara-Dua Sistem, Identitas Nasional, Krisis kepercayaan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3585>

\*Correspondence: Yuniar Zahra Alfriani

Email:

[23102021011@student.unwahas.ac.id](mailto:23102021011@student.unwahas.ac.id)

Received: 14-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Published: 01-03-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The relationship between China, Taiwan, Macau, and Hong Kong has become an international focus because it reflects various complex political, economic, and social dynamics in international issues. China claims Taiwan as part of its territory and officially Macau and Hong Kong have returned to Chinese sovereignty under special autonomy, namely the “one country, two systems” policy. In International Politics, this is very important because it involves the boundaries of state sovereignty and national identity, this has a direct impact on the stability of the East Asian region. This study uses a qualitative approach because it allows analysis of the history, socio-political context, economy, and unique characteristics of each region. Using sources obtained from journals, books, and websites, this study found that economically Hong Kong, Taiwan, and Macau are very dependent on China. However, socially it is a major challenge for China in facing local identity aspirations and the crisis of trust in Hong Kong and Taiwan towards the Chinese government.*

**Keywords:** *China-Taiwan-Macau Relations, State Sovereignty, One Country-Two Systems, National Identity*

## Pendahuluan

Hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan, Hong Kong, dan Makau sangat kompleks karena di pengaruhi sejarah panjang, dinamika politik, serta faktor ekonomi. Dalam konteks sejarah Taiwan bermula dari perang sejarah antara Partai Nasionalis yang melarikan diri ke Taiwan setelah kalah dari Partai Komunis dan mendirikan Republik

Rakyat Tiongkok di daratan. Sedangkan Hong Kong berada di kekuasaan Inggris sejak perang candu, lalu dikembalikan ke Tiongkok melalui Perjanjian Sino-Britania yang menjamin Hong Kong memiliki otonomi tinggi berdasarkan prinsip *“one country, two system”*. Hampir sama namun sedikit berbeda dengan Hong Kong, Makau juga merupakan bekas koloni Portugis yang dikembalikan juga melalui kesepakatan *“one country, two system”*, namun Makau memiliki lebih sedikit ketegangan politik dengan Tiongkok (Student of History, 2024).

Banyak studi yang sudah mengkaji bagaimana model *“one country-two systems”* diterapkan di Hong Kong (1997) dan di Makau (1999). Beberapa studi menunjukkan bahwa prinsip ini tidak hanya membawa stabilitas ekonomi, namun juga ketegangan sosial. Terutama di Hong Kong, di mana protes besar-besaran terjadi karena kebebasan yang dijanjikan terancam dengan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2020. Ini menimbulkan kritik terkait kebebasan politik dan otonomi yang dijanjikan, atas ketidakpuasan ini memberi gambaran apabila diterapkan model yang sama untuk Taiwan yang memiliki identitas nasional yang kuat (Glaser, 2024).

Dinamika hubungan Tiongkok dengan Taiwan, Hong Kong, dan Makau sering kali fokus pada aspek politik, namun dampak ekonomi globalisasi yang berpotensi besar mengubah struktur ekonomi global, investasi, dan perdagangan sering diabaikan. Padahal Hong Kong sudah menjadi pusat keuangan global memiliki hubungan langsung dengan pasar besar Tiongkok, serta peran ekonomi Taiwan dalam rantai pasokan global terutama dibidang teknologi bergantung pada peminatan dari Perusahaan teknologi besar di Tiongkok menunjukkan ketergantungan yang besar antara wilayah ini dengan Tiongkok dan pasar internasional. Tidak hanya itu, globalisasi dalam hal informasi dan teknologi membawa dampak besar terhadap masyarakat terutama di Taiwan. Meskipun ada kecenderungan untuk lebih terbuka secara hubungan ekonomi terhadap Tiongkok, masyarakat Taiwan tetap memiliki rasa identitas demokrasi tinggi (Glaser, 2024).

Saat ini, Tiongkok dan Taiwan sedang berada di pusat ketegangan geopolitik yang melibatkan banyak negara besar. Jika ketegangan ini meningkat, hal ini dapat memicu konflik yang besar. Ini dapat memperburuk ketidakpastian kebijakan luar negeri negara besar terutama Amerika Serikat, yang telah menunjukkan komitmen untuk membela Taiwan meski belum ada diplomatik yang formal di wilayah tersebut. Ketegangan ini dapat mempengaruhi pasar teknologi mengingat Taiwan memainkan peran penting dalam industri semikonduktor global (Sanker & Simpson, 2014).

Untuk memahami analisis hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Diperlukan kajian untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok pada prinsip *“one country- two systems”* yang harus beradaptasi dalam menghadapi tekanan global dan perubahan internasional (Alunaza,

2021). Terutama bagaimana Tiongkok memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk mendekati Taiwan, dan mengelola ketegangan dengan Hong Kong serta Makau.

## Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atau isu secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini mengutamakan analisis data dalam bentuk dokumen, teks, laporan, arsip, artikel, atau materi tertulis lainnya agar memungkinkan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan dinamika yang ada dibalik interaksi politik dan ekonomi di wilayah tersebut yang sepenuhnya tidak dapat dijelaskan dengan data numerik.

Menurut (Moleong, 2017) mengungkapkan studi kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, dan lain-lain, dalam konteks alami. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman mendalam, komprehensif, dan holistik mengenai fenomena atau isu yang sedang diteliti. Moleong menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh umumnya berbentuk kata-kata, deskripsi, atau narasi. Oleh sebab itu, metode pengumpulan data dilakukan melalui narasi, wawancara, dan observasi

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena peneliti beranggapan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk fokus pada makna yang diberikan pada aktor-aktor terkait untuk memberi pemahaman baru berdasarkan data yang diperoleh secara langsung, alih-alih teori yang sudah ada. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis dapat menggali dalam sudut yang lebih luas dan beragam, baik dari pemerintah Tiongkok maupun individu sebagai aktor yang lebih kecil tanpa terjebak pada data numerik yang sering kali tidak dapat mencakup nuansa kompleks dalam fenomena atau isu tersebut.

Dalam melaksanakan pengumpulan data, dibutuhkan instrumen. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber informasi. Setiap instrumen tersebut dirancang untuk mendapatkan data yang bersifat naratif, deskriptif, dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau fenomena yang sedang diteliti dalam penelitian kualitatif. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah dokumentasi dan analisis teks. Instrumen ini sangat berguna untuk memberikan wawasan tentang konteks sosial atau sejarah suatu fenomena atau isu. Prosedur analisis data merupakan salah satu cara atau tahapan-tahapan untuk mengolah dan menganalisis sebuah data agar dapat diubah menjadi informasi yang lebih bervariasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan dapat digunakan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan.

Permasalahan yang dianalisis dalam prosedur pengolahan data adalah isu yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang sedang berlangsung. Karena data dalam penelitian kualitatif sebagian besar berbentuk narasi atau kata-kata, maka proses analisis data dilakukan melalui jurnal, buku, dan berita.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui analisis data, terlihat bahwa dinamika politik dan ekonomi Tiongkok memberikan dampak besar yang melampaui batas-batas wilayah otoritasnya, bahkan mempengaruhi tatanan dunia internasional. Studi ini mencakup analisis dokumen serta berbagai sumber media yang tersedia secara daring. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan kunci:

1. Tiongkok menegaskan kedaulatan Taiwan, Hong Kong, dan Makau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok (RCC) melalui prinsip "*one country-two system*" yang digunakan sebagai dasar untuk menjaga kedaulatan nasional di tengah tekanan dari komunitas global.
2. Tiongkok menawarkan pendekatan damai serta tegas melalui prinsip "*one country-two system*" kepada Taiwan, namun di satu sisi Tiongkok juga menunjukkan kekuatan militernya untuk menekan Taiwan sebagai bentuk otoritasnya dan respons terhadap dukungan militer Amerika Serikat yang melakukan penjualan senjata kepada Taiwan.
3. Tiongkok telah menggunakan jalur diplomatiknya untuk membatasi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain yang bertujuan mencegah pengakuan Taiwan sebagai negara Merdeka dan menegaskan melalui forum internasional untuk mengupayakan agar negara-negara lain mematuhi prinsip "One Tiongkok". Tiongkok bekerjasama dengan negara-negara berkembang untuk menggalang dukungan terhadap prinsip "*one country-two system*" melalui bantuan pembangunan dan investasi ekonomi.
4. Tiongkok berusaha mengontrol narasi internasional melalui propaganda di *platform* sosial untuk mempromosikan pandangan positif "*one country-two systems*" bertujuan menjaga stabilitas dan kedaulatan serta membantah kritik dari negara-negara Barat.
5. Tiongkok memperkenalkan Undang-Undang Keamanan Nasional 2020 yang bersifat mengurangi kebebasan politik dan memperketat kendali di wilayah tersebut serta mengatur aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas dan kedaulatan. Undang-Undang Keamanan Nasional dikeluarkan akibat dari ketidakpuasan terhadap prinsip "*one country-two system*".
6. Tiongkok mendorong integrasi ekonomi antara Taiwan, Hong Kong, dan Makau dengan China Daratan melalui beberapa proyek salah satunya adalah proyek ambisius "*Greater Bay Area*". Ekonomi ini didorong melalui berbagai inisiatif perdagangan, investasi, dan

Pembangunan infrastruktur untuk menciptakan ketergantungan ekonomi wilayah tersebut dengan China Daratan.

## Pembahasan

### A. Bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok pada prinsip “*one country- two systems*” yang harus beradaptasi dalam menghadapi tekanan global dan perubahan internasional?

Kebijakan “*One Country, Two Systems*” merupakan kerangka berpikir politik yang di cetuskan oleh Tiongkok untuk mempertahankan otonomi tertinggi pada wilayah Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Namun saat ini, hanya Hong Kong dan Makau yang menerapkan sistem ini. Ini memungkinkan Hong Kong dan Makau mempertahankan sistem kapitalis dan otonomi mereka selama 50 tahun setelah kembalinya kedua negara tersebut pada tahun 1997 dan 1999.

Kebijakan ini belum dapat diterapkan di Taiwan walaupun sudah diusulkan Tiongkok sebagai solusi penyatuan damai. Taiwan tidak pernah menerima konsep ini dikarenakan beberapa alasan, penolakan ini disebabkan ketidakpercayaan masyarakat Taiwan terhadap Tiongkok yang dianggap tidak benar-benar menghormati “*two system*” di Hong Kong. Secara politik, Taiwan memiliki demokrasi yang kuat dan berbeda dengan sistem sosialis di Tiongkok. Masyarakat Taiwan cenderung memiliki rasa nasional yang merasa bahwa mereka adalah “orang Taiwan” daripada “orang Tiongkok”.

Banyak kritik internasional yang dilemparkan kepada kebijakan “*two system*” terutama dari negara Barat. Negara barat menilai, intervensi Tiongkok yang semakin besar membuat melemahnya prinsip utama dari sistem yang di terapkan ini. Banyak Gerakan protes pro-demokrasi di Hong Kong yang saat ini didukung oleh generasi muda yang cenderung mendukung identitas lokal dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut. Akibat dari ketidakpuasan yang terjadi, Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2020 untuk mengatur aktivitas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara (Aditya, 2009). Muncul tekanan diplomatik, terutama Amerika Serikat sebagai respons undang-undang keamanan nasional yang dianggap mengintervensi dan melemahkan otonomi Hong Kong. Pengalaman Hong Kong terhadap undang-undang tersebut, meningkatkan ketidakpercayaan Taiwan terhadap “*two system*” memperkuat skeptisisme Taiwan terhadap otonomi tinggi. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa Tiongkok tidak benar-benar menghormati prinsip “*two system*” di Hong Kong.

Walaupun banyak masyarakat yang mempertanyakan keteguhan Tiongkok terhadap prinsip tersebut. Demi menjaga kedaulatan Tiongkok terhadap Hong Kong, Tiongkok tetap mereformasi sistem pemilu Hong kong untuk memastikan bahwa hanya “patriot” yang dapat menduduki jabatan politik. Peningkatan rasa kebangsaan di kalangan generasi muda

Hong Kong pun dilakukan melalui kurikulum Pendidikan yang mempromosikan sejarah dan kebudayaan Tiongkok (Iqbal, 2024).

Berbeda dengan Hong Kong, masyarakat Makau memiliki hubungan yang jauh lebih harmonis dengan Tiongkok daratan. Makau cenderung lebih stabil secara politik dan jarang mengalami protes besar-besaran. Walau memiliki kebebasan politik, kebebasan politik di Makau lebih terbatas dibandingkan Hong Kong. Makau jauh lebih mudah di kontrol oleh pemerintah pusat karena lebih kecilnya jumlah penduduk dan ukuran. 80% pendapatan Makau berasal dari industri perjudian, yang membuatnya sangat rentan terhadap perubahan kebijakan dan tekanan global.

Langkah ekonomi juga dijalankan, melalui "*Greater Bay Area Initiative*", Tiongkok mendorong integrasi ekonomi Hong Kong dengan Tiongkok Daratan memperkuat hubungan terutama dalam konteks perdagangan dan teknologi. Tiongkok mendorong diversifikasi ekonomi Makau untuk mengurangi ketergantungan Makau terhadap perjudian. Walaupun otonomi politik terkikis dan melemah, Hong Kong dan Makau tetap menjadi pusat ekonomi dan perdagangan berkat stabilitas yang dijaga oleh pemerintah Tiongkok Daratan.

Taiwan juga menghadapi tekanan serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan untuk menunjukan otoritasnya. Tiongkok menggunakan pengaruhnya untuk membatasi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain yang menyebabkan kurangnya legitimasi Taiwan di Kancah Internasional. Walau kebijakan ini membantu mempertahankan kedaulatan dan kontrol atas Hong Kong dan Makau. Kebijakan ini tidak dapat berlaku di Taiwan karena Dukungan Amerika Serikat mempersulit kemungkinan penerapan kebijakan ini dapat terjadi di Taiwan serta resistensi kuat dari masyarakat dan pemerintah Taiwan. Partai Progresif Demokratik (DPP) salah satu partai di Taiwan sangat menolak penyatuan "*two system*" yang diusulkan Tiongkok. Sedangkan Partai Kuomitang lebih terbuka untuk berdialog dengan Tiongkok Daratan, meskipun tetap menolak usulan tersebut. Taiwan juga telah menekankan bahwa masa depan Taiwan berada ditangan rakyat Taiwan sendiri.

Intervensi Tiongkok di Hong Kong dan Makau serta tekanan terhadap Taiwan telah menjadi subjek kritik internasional terutama dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagian besar kritik ini berasal dari negara Barat terutama Amerika Serikat yang mendukung demokrasi di Taiwan. Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris mengecam keras langkah Tiongkok yang dianggap menyebabkan erosi otonomi karena intervensi yang telah dilakukan. Sebagai respons memburuknya situasi hak asasi manusia di Hong Kong, Inggris menawarkan kewarganegaraan bagi pemegang paspor British National (Overseas). Organisasi seperti Amnesty Internasional menyoroti kasus ini sebagai tanda penurunan demokrasi. Meskipun Makau tidak menghadapi protes besar dan memiliki hubungan yang

harmonis dengan Tiongkok Daratan. Masyarakat internasional memberikan kritik terhadap intervensi Tiongkok terhadap sektor peradilan Makau sebagai upaya yang dilakukan untuk mengontrol perekonomian Makau dan meningkatkan ketergantungan Makau terhadap ekonomi Tiongkok.

Upaya penyatuan paksa Tiongkok terhadap Taiwan pun juga mendapatkan banyak kritik Internasional. Walaupun Tiongkok menggunakan pengaruhnya untuk memutus hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain, Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Taiwan melalui peningkatan diplomatik tidak resmi serta penjualan senjata sebagai respons ancaman militer Tiongkok. Langkah Tiongkok di Hong Kong dan Taiwan telah memperburuk hubungan Tiongkok dengan negara-negara Barat. Tiongkok sendiri menganggap kritik internasional adalah bentuk campur tangan dalam urusan domestiknya. Sebagai respons Tiongkok memperkuat propaganda untuk mempromosikan narasi intervensi bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan. Selain itu, Tiongkok menjatuhkan sanksi pada individu dan organisasi dan mengkritik kebijakannya (Zulkarnain & Sutriyani, 2021).

Tiongkok juga menggunakan pendekatan diplomasi untuk mengalang dukungan terhadap prinsip *"one country-two system"* dengan bekerjasama dengan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui bantuan pembangunan dan investasi. Pendekatan ini Tiongkok berupaya membangun koalisi global untuk mendukung dan mempertahankan posisinya serta membangun dukungan multilateral di PBB. Banyak negara berkembang yang akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui kebijakan Tiongkok (Talaohu, 2022). Dengan dukungan negara berkembang, Tiongkok semakin mampu melindungi kepentingannya untuk memperkuat propaganda *"one Country-two system"* dan menantang dominasi dan kritik negara-negara Barat.

Pada era globalisasi *"one country, two system"* menghadapi banyak tantangan dalam sorotan internasional dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Ekonomi Hong Kong dan Makau sebagai pusat perdagangan bergantung pada hubungan Tiongkok dengan dunia. Intervensi Tiongkok mempengaruhi kepercayaan global pada kedua wilayah tersebut. Globalisasi membawa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ke permukaan, langkah Tiongkok dalam kebijakan Makau dan Hong Kong dalam memperketat kontrol mengundang kritikan internasional yang memicu respons global (Suharman & Pramono, 2021).

Nilai-nilai globalisasi inilah yang memperkuat identitas lokal Hong Kong dan Makau yang menimbulkan perlawanan pada kebijakan yang dianggap menekan otonomi. Tindakan Tiongkok saat ini dalam pantauan masyarakat internasional, citra Tiongkok sebagai kekuatan global dapat berdampak buruk. Globalisasi telah memperumit hubungan Tiongkok dengan Barat dalam isu Hong Kong dan memperkuat hubungan Taiwan dengan

negara lain. Ini memaksa Tiongkok untuk mempertimbangkan menerapkan cara baru agar dapat mempertahankan kontrol bersamaan dengan menanggapi kritik Internasional (Gadis Diandono & Purbantina, 2012).

### **B. Bagaimana Tiongkok memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk mendekati Taiwan, dan mengelola ketegangan dengan Hong Kong serta Makau?**

Salah satu strategi untuk menyatukan kawasan dan memperkuat kontrol dengan memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk mendekati Taiwan dan meredakan ketegangan yang ada di Hong Kong dan Makau. Strategi ini melibatkan investasi, perdagangan, dan infrastruktur untuk membangun ketergantungan ekonomi, meningkatkan keharmonisan, membangun hubungan, dan mengurangi penolakan politik (Syahbuddin, 2019).

Pendekatan ekonomi Tiongkok terhadap Hong Kong dapat dilihat dari integrasi ekonomi yang dipromosikan oleh Tiongkok antara Hong Kong, Makau, dan Sembilan kota di Provinsi Guangdong melalui proyek "Greater Bay Area". Ini adalah proyek ambisius dari pemerintah Tiongkok untuk merancang kawasan metropolitan paling dinamis didunia. GBA bertujuan menjadikan kawasan ini sebagai pusat inovasi dan keuangan global, yang mengandalkan kontribusi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. Selain melalui GBA, Tiongkok juga membantu memberikan dukungan ekonomi selama protes pro-demokrasi saat pandemi COVID-19 untuk mempertahankan Hong Kong sebagai pusat bisnis global. Untuk memperkuat ekonomi lokal, Tiongkok juga mendorong perusahaan Tiongkok untuk mencatatkan saham mereka di Bursa Efek Hong Kong. Investasi dan sektor properti yang didominasi oleh pengusaha Tiongkok daratan telah menyebabkan meningkatnya pengaruh Tiongkok dalam perekonomian Hong Kong dan meningkatkan ketergantungan. Pada akhir 2019, perusahaan daratan menguasai 73 persen dari kapitalisasi pasar Hong Kong, menurut Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong (Bame, 2020).

Tiongkok juga mendorong diversifikasi ekonomi Makau yang bergantung pada perjudian dengan mempromosikan pariwisata dan ekonomi digital. Investasi dalam infrastruktur pun juga ditingkatkan salah satunya adalah jembatan Hong Kong – Zhuhai – Makau, untuk memperkuat hubungan fisik antara Tiongkok Daratan dengan Makau. Sama halnya dengan Hong Kong, Makau juga tergabung ke dalam proyek ambisius "Greater Bay Area" yang akan diintegrasikan sebagai pusat pariwisata dan hiburan regional. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui kebijakan untuk meningkatkan wisatawan ke Makau untuk meningkatkan pendapatan lokal. Tiongkok juga melakukan Upaya uji coba penggunaan yuan digital sebagai bentuk integrasi sistem keuangan Makau dengan Daratan.

Di Taiwan sendiri, Tiongkok adalah penyumbang ekspor terbanyak di Taiwan, tercatat Tiongkok menyumbang 40% dari total ekspor Taiwan (Dano, 2022). Demikian pula impor terbesar Taiwan justru datang dari China yang mencapai 22.7% (Dano, 2022). Investasi Tiongkok kepada Taiwan cenderung mengarah pada sektor strategis seperti teknologi dan manufaktur yang menciptakan ketergantungan ekonomi. Pendekatan ekonomi yang dilakukan Tiongkok adalah membuka peluang pengusaha Taiwan untuk berinvestasi di Daratan melalui kebijakan “31 Measures” dan “26 Measures”. Kebijakan 31 Measures tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan lintas selat dengan memberikan kesempatan yang setara bagi warga Taiwan di Tiongkok, sebagai kelanjutan kebijakan 26 Measures diluncurkan dengan fokus yang lebih tajam pada integrasi ekonomi dan peran aktif warga Taiwan di Tiongkok. Tiongkok memanfaatkan hubungan ekonomi melalui kesepakatan ECFA yang bertujuan melembagakan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Taiwan dan China (Dano, 2022). Pengusaha Taiwan juga diizinkan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor strategis. Dengan harapan membangun hubungan emosional dan sosial, Tiongkok menawarkan peluang kerja, Pendidikan, dan fasilitas bagi warga Taiwan di Daratan. Meskipun memberikan banyak keuntungan, Tiongkok juga menerapkan tekanan ekonomi berupa sanksi ekonomi terhadap Perusahaan atau Negara luar yang memperkuat hubungan dengan Taiwan.

Tiongkok memanfaatkan skala pasar dan ekonominya yang besar untuk membangun ketergantungan ekonomi Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Investasi besar dalam Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah ini dengan daratan juga meningkatkan pengaruh Tiongkok kepada wilayah-wilayah ini. Sektor teknologi Tiongkok menciptakan sinergi ekonomi yang menguntungkan wilayah tersebut. Namun, di satu sisi banyak kekhawatiran Hong Kong dan Makau yang menganggap ketergantungan ekonomi sebagai alat mengurangi otonomi politik. Sama halnya dengan Hong Kong dan Makau, meski diberi banyak keuntungan, rakyat Taiwan memberikan respons skeptis terhadap motif Tiongkok. Ketergantungan ini di khawatirkan akan menghilangkan identitas dan kebebasan mereka (Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat, 2023).

Meskipun pendekatan ekonomi Tiongkok ini sangat efektif dalam membangun hubungan, di era globalisasi akan diuji kemampuan Tiongkok menyeimbangkan dan mempertahankan kontrol politik dan pembangunan ekonomi.

## Simpulan

Ambisi Tiongkok untuk menyatukan wilayah melalui kebijakan “*one country, two system*” dapat dilihat dari strategi ekonomi dan politiknya yang bertujuan mempertahankan kontrol, memperkuat konektivitas, dan menciptakan ketergantungan ekonomi Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini mendapatkan banyak

tantangan, tekanan, serta kritik internasional atas erosi otonomi dan demokrasi di wilayah tersebut. Tiongkok yang dianggap menekan kebebasan di Makau mendapat sorotan internasional, sedangkan pendekatan serupa terhadap Taiwan memicu penolakan politik yang kuat terutama pada generasi muda.

Keberlanjutan kebijakan ini bergantung pada langkah yang akan diambil pemerintah Tiongkok untuk menjaga keseimbangan antara kontrol politik dan ekonomi. Jika ketegangan politik terus meningkat, Tiongkok akan kehilangan legitimasinya di mata global. Namun sebaliknya, apabila stabilitas dan ekonomi dapat dijaga akan menjadi kunci keberhasilan jangka Panjang. Tiongkok juga diharapkan dapat meningkatkan diplomasi untuk meredakan ketegangan internasional dengan menjelaskan pentingnya stabilitas di wilayah tersebut.

### Daftar Pustaka

- Aditya, R. (2009). PERLUASAN KERJASAMA CHINA DENGAN TAIWAN PADA 4 NOVE!\ 1BER 2008 DI TAIPEI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh PERLUASAN KERJASAMA CffINA DENGAN TAIWAN PADA 4 NOVEMBER 2008 DI TAIPEI.
- Ahzani, W. F. (2021). UPAYA PEMERINTAHAN TSAI ING-WEN MELAWAN TEKANAN ONE-CHINA PRINCIPLE PADA ERA XI JINPING. *Jurnal Syntax Transformation*.
- Alunaza, H. (2021). Perspektif Baru Politik Luar Negeri China dalam Konstelasi Politik Global: Resensi Buku. *Indonesian Perspective*, 6(1), 118–121. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37516>
- Bame, H. (2020, juli 2). Pasar Hong Kong yang besar sekligus gerang masuk china daratan. Inakoran.
- Dano, D. (2022). DALAM PERFEKTIF EKONOMI, MEMUNGKINKAN REUNIFIKASI CHINA-TAIWAN DILAKUKAN MELALUI JALAN DAMAI. *Jurnal P4I*.
- Dian Pertiwi, A. F. (2021). IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP KEMERDEKAAN TAIWAN. *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*.
- Gadis Diandono, I., & Purbantina, A. P. (2012). Diplomasi Diaspora Cina Terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Cina (2017-2021). *Intermestic: Journal of International Studiese*, 6(2), 398–421. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.8>
- Glaser, F. &. (2024). Interpreting Xi Jinping "Two systems' Taiwan Plan".
- Iqbal, M. (2024). Posisi Hongkong Dalam pembangunan Ekonomi Tiongkok. 1–21.
- Kristoforus Bagas Romualdi, & Saefur Rochmat. (2023). Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori Attitudinal Factor. *Review of International Relations*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.24252/rir.v5i1.35279>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* .

- 
- Rochmat, K. B. (2023). Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori Attitudinal Factor. *Review of International Relations*, 53.
- Sanker, K., & Simpson, P. (2014). China : Policy Watershed. 2(1), 256–266.
- Student of History. (2024). Taiwan, Hong Kpng, and, Makau.
- Suharman, Y., & Pramono, S. (2021). Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia. *Spektrum*, 18(1), 1–20.
- Syahbuddin. (2019). Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan. *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(2), 70–81. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.211>
- Talaohu, S. N. (n.d.). HAMBATAN TIONGKOK DALAM MEWUJUDKAN REUNIFIKASI DENGAN TAIWAN.
- Zulkarnain, Z., & Sutriyani, N. (2021). Kepentingan ekonomi politik China dalam pembentukan AsianInfrastructure Investment Bank (AIIB) di kawasan Asia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 7(4), 684–689. <http://dx.doi.org/10.29210/020211376>